RESENSI BUKU

Judul Buku	: Birokrasi Digital
Pengarang	: Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D
Penerbit	: PT Pustaka Alfabet
Tahun Terbit	: 2019
Cetakan	: 1
Dimensi Buku	: 286 halaman, 14 x 21 cm

Adalah Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D., Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang juga penulis buku Birokrasi Digital, merasakan begitu besar, kompleks, dan beragamnya urusan yang diampu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dikatakan kompleks dan beragam karena bisa sangat berbeda antara urusan satu dengan lainnya. Sebagai contoh urusan mengenai lembaga pemasyarakatan, imigrasi, dan administrasi hukum partai politik adalah tiga hal yang sangat berbeda sedangkan ketiganya sama-sama dibawah tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, beliau menggagas adanya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam pelaksanaan tugas di berbagai urusan pada Kementarian Hukum dan HAM.

Mengutip pada pernyataan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang menyebutkan bahwa untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa, kita perlu melakukan revolusi mental. Dengan asusmsi bahwa eksistensi birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka reformasi birokrasi adalah wujud dari implementasi revolusi mental. Birokrasi menjadi tolok ukur penting dalam menilai performa pemerintah kepada rakyat.

Perubahan kearah yang lebih baik pada birokrasi akan dapat dilaksanakan apabila kita memahami nilai dasar apa saja yang ada dan masih melekat. Nilai dasar yang saat ini masih ada pada birokrasi kita, pertama, nilai yang berorientasi kekuasaan yang pelayanannya tidak menitikberatkan kinerja, namun lebih mementingkan kedekatan hubungan. Kedua, ego sektoral yang lebih mengedepankan kepentingan unit, instansi dan sektornya. Dan yang ketiga pelayanan publik yang diskriminatif, yang lebih mementingkan siapa yang mempunyai uang dan dapat membayar dengan harga

tinggi. Revolusi mental pada birokrasi juga harus dimaknai sebagai adanya sebuah perubahan positif atas mindset dan kebiasaan bagi aparatur birokrasi sehingga terbentuk aparatur yang bersih, kompeten, bekerja efektif dan efisien, serta berperilaku melayani dan bukan justru ingin dilayani.

Di era saat ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah sangat lazim digunakan seiring dengan mudahnya akses internet oleh masyarakat. Aplikasi TIK seperti internet atau akrab disebut digitalisasi dapat digunakan dalam meningkatkan akses publik terhadap proses penyelenggaraan negara serta memudahkan dalam mengurus berbagai macam pelayanan pemerintah dengan lebih mudah dan efisien waktu. Dengan digitalisasi, birokrasi tradisional yang dikenal dengan persepsi buruk berkenaan dengan kinerja yang lambat, berproduktivitas rendah dan berbelit-belit, dapat diubah menjadi fleksibel, berproduktivitas tinggi, dan memiliki tingkat responsibilitas yang dapat diandalkan.

Birokrasi digital adalah lembaran baru bagi birokrasi Indonesia yang diharapkan mampu bergeser dari birokrasi konvensinal menjadi birokrasi yang tidak hanya modern tetapi juga berevolusi menjadi birokrasi yang ideal dan menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan begitu birokrasi digital merupakan sebuah keniscayaan yang mana akan mengantar negara ini mencapai prinsip-prinsip *good governance.*

Buku ini ditulis oleh Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D., Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan semangat perubahan kearah yang lebih baik, yaitu pada reformasi birokrasi. Pelayanan digital yang diterapkan pada layanan jasa dan pembayaran online di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (Ditjen AHU) ternyata mampu mempercepat proses pelayanan publik, dan memastikan pelayanan secara transparan tanpa ada pungutan biaya. Berkaca pada hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa kedepannya penerapan birokrasi secara digital adalah sebuah keharusan. Di dalam buku ini juga mengulas mengenai keadaan birokrasi di Indonesia saat ini, harapan kedepan mengenai birokrasi digital dengan perpegang pada prinsip-prinsip *good governance*, serta hubungan antara birokrasi digital dengan upaya meminimalisir korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelebihan buku ini adalah Bahasa penyampaiannya yang mudah dipahami, dan disisipi dengan contoh-contoh nyata suatu persoalan yang berhubungan dengan pelaksanaan birokrasi.